

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN  
ADMINISTRATIF DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG  
DISABILITAS INTELEKTUAL USIA PRODUKTIF  
(STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN  
PONOROGO)**

**Anggi Fatikaningrum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[angginingrum44@gmail.com](mailto:angginingrum44@gmail.com)

**Bambang Kusbandrijo**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[Bk.untag@gmail.com](mailto:Bk.untag@gmail.com)

**Rizky Dwijayanti**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
[dwijyantirizky@gmail.com](mailto:dwijyantirizky@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam memperoleh pelayanan publik dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo diketahui memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan administratif dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (*purpose*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas intelektual, layanan dokumen kependudukan, dan pendekatan langsung kepada keluarga. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui Rumah Harapan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukungnya antara lain keberadaan Rumah Harapan, dukungan keluarga, komitmen pemerintah desa, dan peran pendamping. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, dan perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta

pengembangan program yang lebih sesuai bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat.

**Kata Kunci:** *Strategi Pemerintahan Desa, Pelayanan Administrasi, Pemberdayaan, Disabilitas Intelektual.*

#### **ABSTRACT**

People with intellectual disabilities are a group that requires attention in accessing public services and opportunities to develop their abilities. Karangpatihan Village, Ponorogo Regency, is known to have a relatively large number of individuals with intellectual disabilities, encouraging the village government to implement various administrative service and empowerment programs. This study aims to analyze the strategy of the Karangpatihan Village Government in providing administrative services and empowerment for productive-age individuals with intellectual disabilities, as well as to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employed a descriptive qualitative method using Geoff Mulgan's strategy theory, which consists of purpose, direction, action, and learning. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and then analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that administrative services are carried out through data collection, civil administration services, and direct approaches to families of individuals with intellectual disabilities. Meanwhile, empowerment programs are implemented through Rumah Harapan and include ciprat batik production, doormat making, prayer bead crafting, livestock farming, agricultural labor activities, and religious guidance tailored to each individual's abilities. Supporting factors include the existence of Rumah Harapan, family support, the commitment of the village government, and the role of facilitators. Inhibiting factors include limited human resources with specialized competencies, budget constraints, and differences in the ability levels of individuals with intellectual disabilities. This study concludes that the strategies implemented by the Karangpatihan Village Government have contributed to improving the skills and independence of individuals with intellectual disabilities. However, strengthening human resources with expertise in intellectual disability services and developing programs that are more suitable for individuals with severe intellectual disabilities remain necessary.

**Keywords:** *Village Government Strategy, Administrative Services, Empowerment, Intellectual Disabilities.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif sehingga memerlukan dukungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik, kesempatan kerja, serta program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang

menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi serta kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan administratif dan pemberdayaan merupakan dua aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual. Pelayanan administratif diperlukan untuk memastikan terpenuhinya dokumen kependudukan dan akses terhadap berbagai layanan publik. Sementara itu, pemberdayaan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta kemandirian penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang dikenal memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual cukup besar. Kondisi tersebut menjadikan pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas intelektual. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Desa Karangpatihan membentuk Rumah Harapan sebagai wadah pembinaan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif.

**Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo**

| No    | Jenis Disabilitas                            | Jumlah     |
|-------|--|------------|
| 1     | Disabilitas Intelektual / Tunagrahita        | ±200 orang |
| 2     | Disabilitas Fisik                            | ±25 orang  |
| 3     | Tuna Netra                                   | ±5 orang   |
| 4     | Disabilitas Lainnya (cacat tubuh/kaki/badan) | ±10 orang  |
| Total |  | ±240 orang |

*Sumber: Data Klien LKS Rumah Harapan Mulya Tahun 2026, diolah penulis*

Berdasarkan data tersebut, penyandang disabilitas intelektual menjadi salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah desa. Kondisi ini disebabkan karena penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam aspek kemampuan kognitif, komunikasi, dan adaptasi sosial yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses berbagai layanan publik maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar hak-hak sebagai warga negara tetap dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, jumlah penyandang disabilitas intelektual yang relatif besar di Desa Karangpatihan menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang cukup penting dalam menyediakan pelayanan administratif serta program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas intelektual.

**Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas Intelektual Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2026**

| Kelompok Usia                | Jumlah |
|------------------------------|--------|
| Usia Produktif (15–64 Tahun) | 111    |
| Non Produktif                | 81     |
| Total                        | 192    |

*Sumber: Data Klien LKS Rumah Harapan Mulya Tahun 2026, diolah penulis.*

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan berada pada kelompok usia produktif, yaitu sebanyak 111 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas intelektual masih berada pada usia yang memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menjadi penting karena pelayanan yang diberikan pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi kependudukan, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemberdayaan guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas intelektual usia produktif.

Berbagai program telah dilaksanakan melalui Rumah Harapan, seperti pembuatan batik ciprat, keset, tasbih, kegiatan peternakan, buruh tani, serta pembinaan keagamaan. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas intelektual sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing individu.

Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan administratif dan pemberdayaan masih menghadapi beberapa kendala. Perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual menyebabkan pendekatan yang diberikan tidak dapat disamakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Pada kategori disabilitas intelektual berat, program pemberdayaan yang diberikan juga masih terbatas dibandingkan kategori ringan dan sedang.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pelayanan publik maupun pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemerintah desa dalam mengintegrasikan pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya dengan menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (*purpose*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Pelayanan administratif merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan dan layanan dasar lainnya. Pelayanan administratif menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan akses terhadap berbagai layanan publik. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan administratif dikaji melalui berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas intelektual usia produktif. Penyandang disabilitas intelektual sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan administratif yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam konteks penyandang disabilitas intelektual, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kemampuan sosial, kepercayaan diri, dan kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan publik dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan yang sering ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani penyandang disabilitas, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya program yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pelayanan publik atau pemberdayaan secara terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemerintah desa dalam mengintegrasikan pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif.

Untuk menganalisis strategi tersebut, penelitian ini menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan. Menurut Geoff Mulgan, keberhasilan suatu strategi dipengaruhi oleh empat unsur utama yaitu tujuan (*purpose*), pengarahannya (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Tujuan berkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai, pengarahannya berkaitan dengan upaya memberikan arahan dalam pelaksanaan program, tindakan berkaitan dengan pelaksanaan strategi yang telah direncanakan, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program. Keempat unsur tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administratif dan melaksanakan program pemberdayaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, yang dikenal sebagai salah satu desa dengan jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pelaksanaan pelayanan administratif dan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual. Informan penelitian meliputi Kepala Desa Karangpatihan, perangkat desa, pengelola Rumah Harapan, pendamping, keluarga penyandang disabilitas intelektual, serta penyandang disabilitas intelektual usia produktif yang mengikuti program pemberdayaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, data penyandang disabilitas, laporan kegiatan Rumah Harapan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pelayanan administratif dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai strategi yang diterapkan pemerintah desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan pemberdayaan yang berlangsung di Rumah Harapan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta didukung oleh data dokumentasi yang relevan. Analisis strategi pemerintah desa dalam penelitian ini menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang terdiri atas empat indikator, yaitu tujuan (*purpose*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif dilakukan melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah desa, pengelola Rumah Harapan, pendamping, keluarga, serta penyandang disabilitas intelektual itu sendiri. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemampuan dan kemandirian penyandang disabilitas intelektual melalui berbagai kegiatan

pemberdayaan. Dalam penelitian ini, analisis strategi pemerintah desa menggunakan teori Geoff Mulgan yang terdiri dari tujuan (*purpose*), pengarahan (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*).

### **1. Tujuan (*Purpose*)**

Tujuan utama yang ingin dicapai Pemerintah Desa Karangpatihan melalui pelayanan administratif dan program pemberdayaan adalah membantu penyandang disabilitas intelektual agar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemenuhan dokumen administrasi kependudukan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang dapat melatih kemampuan, keterampilan, dan kemandirian mereka.

Keberadaan Rumah Harapan menjadi salah satu bentuk nyata dari tujuan tersebut. Rumah Harapan tidak hanya difungsikan sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sebagai ruang pembinaan bagi penyandang disabilitas intelektual. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, pemerintah desa berupaya memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara, tujuan yang ingin dicapai bukan semata-mata agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan tertentu, melainkan agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Oleh karena itu, program yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produktif, tetapi juga pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan sosial dan keagamaan.

### **2. Pengarahan (*Direction*)**

Agar program yang dijalankan dapat berjalan sesuai tujuan, pemerintah desa bersama pendamping Rumah Harapan melakukan berbagai bentuk pengarahan kepada penyandang disabilitas intelektual. Pengarahan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing peserta. Cara ini dipilih karena kemampuan memahami instruksi pada setiap penyandang disabilitas intelektual tidak sama.

Dalam praktiknya, pendamping lebih sering menggunakan metode contoh langsung dibandingkan penjelasan secara teori. Penyandang disabilitas diajak melihat, meniru, dan mempraktikkan kegiatan yang diajarkan secara berulang. Pendekatan seperti ini dinilai lebih mudah dipahami sehingga peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lebih baik.

Selain dilakukan di Rumah Harapan, proses pengarahan juga didukung oleh keluarga di lingkungan rumah. Keterlibatan keluarga menjadi penting karena apa yang telah diajarkan oleh pendamping dapat terus dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kerja sama tersebut, proses pembinaan menjadi lebih berkelanjutan.

### **3. Tindakan (*Action*)**

Bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah desa terlihat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan di Rumah Harapan. Kegiatan tersebut antara lain pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, pembuatan tasbih, peternakan, buruh tani, serta pembinaan keagamaan. Setiap kegiatan diberikan sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas intelektual sehingga mereka dapat mengikuti prosesnya dengan baik.

Batik ciprat menjadi salah satu kegiatan yang cukup dikenal karena hasil produksinya telah dipasarkan ke berbagai daerah. Dalam kegiatan ini, penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses pembuatan sesuai kemampuan masing-masing. Selain batik ciprat, terdapat pula kegiatan pembuatan keset dan tasbih yang bertujuan melatih ketelitian, kesabaran, serta keterampilan motorik peserta.

Beberapa penyandang disabilitas intelektual juga terlibat dalam kegiatan peternakan dan pekerjaan di bidang pertanian. Dari kegiatan tersebut mereka memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi. Meskipun jumlahnya tidak selalu besar, hasil yang diperoleh memberikan pengalaman dan rasa bangga karena mereka dapat memperoleh pendapatan dari hasil kerja sendiri.

Program pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi. Rumah Harapan juga memberikan pembinaan keagamaan seperti latihan salat, mengaji, dan pembiasaan perilaku sehari-hari. Menurut pendamping, perubahan yang terlihat justru tidak hanya pada kemampuan bekerja, tetapi juga pada kemampuan mengurus diri sendiri, kedisiplinan, dan keberanian untuk berinteraksi dengan orang lain.

#### **4. Pembelajaran (*Learning*)**

Pelaksanaan program pemberdayaan di Rumah Harapan tidak terlepas dari proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Pendamping dan pemerintah desa terus mengamati perkembangan peserta untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang diberikan dapat dipahami dan dijalankan oleh penyandang disabilitas intelektual.

Dari proses tersebut diketahui bahwa tidak semua kegiatan dapat diterapkan kepada seluruh peserta. Perbedaan tingkat kemampuan menyebabkan setiap penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang berbeda. Karena itu, jenis kegiatan maupun metode pendampingan terus disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

Melalui pengalaman selama menjalankan program, pemerintah desa dan pendamping memperoleh banyak pembelajaran mengenai cara mendampingi penyandang disabilitas intelektual. Evaluasi yang dilakukan menjadi dasar dalam memperbaiki dan menyesuaikan program sehingga kegiatan yang diberikan dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual usia produktif terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program. Keberadaan Rumah Harapan menjadi salah satu faktor penting karena berfungsi sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan, pembinaan, dan pendampingan bagi penyandang disabilitas intelektual. Selain itu, komitmen Pemerintah Desa Karangpatihan dalam memberikan pelayanan administrasi dan mendukung kegiatan pemberdayaan turut membantu keberlangsungan program yang dijalankan. Dukungan keluarga juga menjadi faktor yang tidak kalah penting karena keluarga berperan dalam mendampingi serta membantu penyandang disabilitas intelektual menerapkan keterampilan dan kebiasaan yang telah diajarkan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya kerja sama antara pemerintah

desa, pengelola Rumah Harapan, pendamping, dan keluarga sehingga kebutuhan penyandang disabilitas intelektual dapat diidentifikasi dan ditangani secara bersama-sama sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Di samping faktor pendukung tersebut, pelaksanaan pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual di Desa Karangpatihan masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang disabilitas intelektual sehingga proses pendampingan masih bergantung pada beberapa pendamping yang telah berpengalaman. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan program dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih memadai. Hambatan lainnya adalah adanya perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual sehingga metode pembinaan dan jenis kegiatan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta. Berdasarkan hasil penelitian, program pemberdayaan yang ada juga masih lebih banyak menjangkau penyandang disabilitas intelektual kategori ringan dan sedang, sedangkan penyandang disabilitas intelektual kategori berat masih memerlukan bentuk pendampingan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan program yang lebih inklusif serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia masih diperlukan agar pelayanan administratif dan pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administratif dan Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Usia Produktif di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Karangpatihan telah melaksanakan pelayanan administratif dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah desa, pengelola Rumah Harapan, pendamping, serta keluarga. Pelayanan administratif dilakukan melalui pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan guna memastikan penyandang disabilitas intelektual memperoleh hak administrasinya sebagai warga negara.

Dalam aspek pemberdayaan, pemerintah desa melalui Rumah Harapan melaksanakan berbagai kegiatan seperti batik ciprat, pembuatan keset, pembuatan tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Program tersebut tidak hanya memberikan keterampilan produktif, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, serta kemandirian penyandang disabilitas intelektual dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh keberadaan Rumah Harapan, komitmen pemerintah desa, dukungan keluarga, serta peran pendamping yang aktif dalam proses pembinaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat. Oleh

karena itu, diperlukan pengembangan program yang lebih inklusif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan dan pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Karangpatihan perlu meningkatkan kapasitas pendamping dan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan serta pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual melalui pelatihan yang berkaitan dengan penanganan disabilitas intelektual.
2. Pengelola Rumah Harapan bersama pemerintah desa perlu mengembangkan program pemberdayaan yang lebih beragam dan menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas intelektual, khususnya bagi kategori berat yang masih memerlukan pendampingan lebih intensif.
3. Kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga sosial, perguruan tinggi, maupun pihak swasta perlu terus ditingkatkan untuk mendukung keberlanjutan program pemberdayaan, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun bantuan sarana dan prasarana.
4. Keluarga diharapkan tetap berperan aktif dalam mendukung proses pembinaan yang telah diberikan melalui Rumah Harapan sehingga kemampuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai tingkat kemandirian penyandang disabilitas intelektual setelah mengikuti program pemberdayaan, khususnya pada kategori disabilitas intelektual berat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A., Rohmatiah, A., Iswati, R., & Lukito, M. (2023). Pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program keterampilan handycraft untuk mendorong kemandirian ekonomi di Paguyuban Disabilitas Krida Karya Mandiri.
- Asian Development Bank. (2022). *Building Resilience of the Urban Poor in Indonesia*. <https://doi.org/10.22617/TCS220055-2>
- Chairunnisa, S., & Sulistio, E. B. (2025). Analisis peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v7i2.25542>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford University Press.
- Oktavianes, A., Sjafari, A., & Maisaroh, I. (2024). Pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terhadap penyandang disabilitas. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 5(1).
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.*

Simanullang, Y. M., Atika, T., & Ritonga, U. (2022). Implementasi program bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* Refika Aditama.

WHO. (2022). *Disability.* <https://www.who.int/health-topics/disability>

Ini jauh lebih kuat dan lebih sesuai dengan judul skripsimu dibanding daftar yang sekarang.